

# Irman dan Etika Relasi Pejabat

**SUNGGUH** tak disangka, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman bisa terseret ke dalam nista bingkisan suap. Sabtu lalu (17/9) Irman tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas karena diduga menerima suap senilai Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. KPK juga menahan Memi (istri Sutanto) dan Farizal, seorang jaksa yang diduga menerima suap dari Sutanto sebesar Rp 365 juta untuk membantu pengurusan perkara SNI impor gula di Pengadilan Negeri Padang.

Menurut KPK, suap dari Sutanto kepada Irman diduga terkait dengan pemberian rekomendasi (secara lisan) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) di Sumatera Barat supaya Bulog memberi jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya. Aneh, pejabat bergaji Rp 133 juta per bulan (sebagai anggota, ketua, dan alat kelengkapan DPD) masih tergiur dengan uang suap Rp 100 juta.

Padahal, selama ini Irman dikenal sebagai tokoh yang santun dan bersahaja serta mampu memosisikan DPD sebagai lembaga penyojuk saat situasi politik sedang memanas pasca-Pilpres 2014. Harapan publik dan pemerintah sempat bertumpu pada DPD ketika terjadi ketegangan antara Koalisi Merah

Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang pro pemerintah.

Sayang, citra Irman dan lembaga yang dipimpinnya seolah runtuh seketika setelah KPK menetapkan sebagai tersangka. Sejak keruntuhan itu pula, sebutan "Yang mulia" bagi si pejabat berubah menjadi "Yang hina". Karena itu, kasus Irman merupakan sebuah tamparan keras bagi para pejabat yang doyan menerima suap. Para pejabat negara seharusnya memiliki kehebatan moral karena di pundak merekalah patron etika republik ini dipertaruhkan. Jabatan publik itu penuh kerelaan dan pengorbanan, bukan malah dimanfaatkan untuk ego dan hedonisme.

## Kewaspadaan Moral Pejabat

Pejabat publik memang berisiko terjatuh ke dalam jerat atau godaan uang/materi apabila ia tidak mampu menjaga dirinya dengan penuh kewaspadaan. Misalnya, menurut pengacara Irman, Irman tidak tahu isi bingkisan yang diberikan Sutanto. Tapi, faktanya ialah ada bingkisan yang diterima Irman. Seandainya Irman sangat waspada secara moral, tidak hanya menolak keras bingkisan sejak awal, dia juga tidak akan menerima kehadiran pengusaha ke rumah dinas dalam rangka membahas suatu kepentingan bisnis.

Dalam kasus rekaman "papa



O l e h

## AUGUSTINUS SIMANJUNTAK\*

minta saham" (misalnya), pertemuan antara Setya Novanto dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha M. Reza Chalid telah memaksa Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR. Pertemuan tersebut dinilai publik tidak etis karena diadakan di luar forum resmi dan berpotensi adanya penyalahgunaan jabatan. Memang, pejabat itu wajar sering kedatangan tamu dari berbagai golongan dan kepentingan. Namun, semua penerimaan tamu seharusnya dilakukan secara terbuka dan resmi.

Pejabat publik tidak patut menjalin relasi atau komunikasi dengan berbagai pihak secara sembarangan, kecuali dalam konteks *blusukan*. Dalam jabatan publik terdapat tanggung jawab untuk menyelaraskan sikap batin/pikiran, komitmen moral dan

perbuatan si pejabat. Dengan demikian, setiap pertemuan pejabat dengan para tamunya mestinya didokumentasikan secara resmi di kantor pejabat supaya terhindar dari risiko godaan suap bahkan jebakan (beberapa pihak menyatakan Irman dijabat). Rumah dinas seharusnya berfungsi sebagai tempat tinggal/hunian dan penunjang bagi kinerja si pejabat.

Jadi, pembahasan rekomendasi (*katabelece*) bagi oknum pengusaha di rumah dinas pejabat sudah sepatutnya dicurigai sebagai tindakan devian, atau tidak adil (diskriminasi terhadap pengusaha) dan tidak transparan. Si pejabat telah mengistimewakan pengusaha tertentu dengan menerimanya di rumah dinas. Semua pejabat harus tegas menyatakan bahwa urusan terkait jabatan hanya boleh dibicarakan di kantor. Sedangkan soal *katabelece* ke pengusaha tertentu itu wajar saja jika si pejabat sudah membahasnya secara terbuka di rapat institusi.

Artinya, rekomendasi tersebut diberikan secara institusional, bukan tindakan pribadi si pejabat. Perusahaan yang direkomendasikan itu tentu dipilih berdasar penilaian objektif institusi. Misalnya: si pengusaha dianggap memiliki integritas tinggi, sudah terbukti profesional (sesuai rekam jejak), dan belum ada

perusahaan yang kualitasnya setara dengan perusahaan yang direkomendasikan.

Jadi, *katabelece* patut diduga korup jika dilakukan secara tersembunyi dan tanpa berita acara. Lagi pula, seorang pejabat negara tidak seharusnya bertemu atau berelasi dengan sembarang orang. Ia tidak seharusnya berteman dengan pihak-pihak yang sedang berurusan dengan hukum. Ironisnya, Irman (sebagai ketua DPD) malah menjalin relasi khusus dengan Sutanto yang notabene sedang beperkara di pengadilan. Andai kata Irman menyadari posisinya sebagai pejabat negara, dia seharusnya menjauhkan diri dari pihak Sutanto.

Sesuai hasil penelusuran KPK, Irman terbukti dekat dengan Sutanto dalam transaksi suap sehingga sulit terbantahkan bahwa dia sebenarnya mengetahui status Sutanto yang sedang berperkara. Itu berarti, Irman sejak awal bermain api dengan orang yang sedang bermasalah. Rupanya pepatah "mati semut karena gula" relevan bagi Irman. Manisnya suap dari bisnis gula telah membuat Irman terlena. Irman tidak sadar, di balik manisnya suap dari bisnis gula itu bisa mematikan semua karir dan nama baiknya. (\*)

\* Dosen etika bisnis di FE UK Petra Surabaya